



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**UNIT KERJA** : DINAS KOPERASI DAN UKM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GUSTI YANUAR NOOR RIFAI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **187882**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.922.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,  
HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI  
Rp. 72.000.000
3. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI  
Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA  
BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah Seluas 374 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,  
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/40 m2 di KAB / KOTA  
BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 129.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI  
Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 110.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 2.000.000

4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 387.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. 450.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 174.311.064

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.062.311.064

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.062.311.064

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.